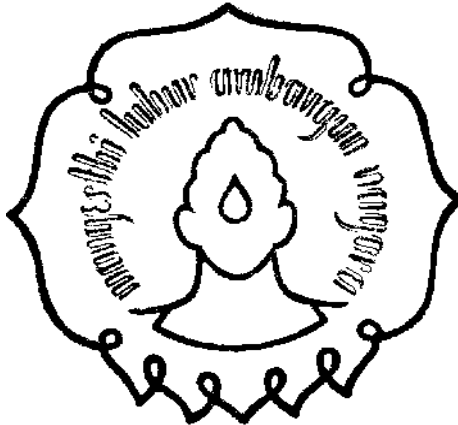


**Analisis tentang eksistensi asas hak untuk diam (*the right to remain silent*)  
bagi tersangka dan terdakwa berdasarkan kitab undang-undang hukum  
acara pidana dan proyeksi dalam proses perkara pidana**



## **S K R I P S I**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih  
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Disusun Oleh :**

**Rusiana Ika Puspitasari**

**E.1106043**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM (*THE RIGHT TO REMAIN SILENT*) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**RUSIANA IKA PUSPITASARI**

**E 1106043**

**Disetujui untuk Dipertahankan**

**Dosen Pembimbing**

**KRISTIYADI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1958 1225198601 1001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM (*THE RIGHT TO REMAIN SILENT*) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**RUSIANA IKA PUSPITASARI**

**E 1106043**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Juli 2010

**TIM PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. ( ..... )  
NIP. 1957 0629 198503 1 002  
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. ( ..... )  
NIP. 1962 0209 198903 1001  
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum. ( ..... )  
NIP. 1958 1225 198601 1 001  
Anggota

**MENGETAHUI**

**Dekan,**

**Mohammad Jamin, S.H, M.Hum**

**NIP. 1961 0930 198601 1 001**

## PERNYATAAN

Nama : Rusiana Ika Puspitasari  
NIM : E1106043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM ( *THE RIGHT TO REMAIN SILENT*) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA adalah betul-betul  
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini  
diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari  
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi  
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya  
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Juli 2010  
Yang membuat pernyataan

Rusiana Ika Puspitasari  
NIM. E 1106043

## MOTTO

*Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*  
(Al-Insyirah : 5-6)

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.*  
(Al-Baqarah : 216)

*Jangan menyesali apa yang telah terjadi tetapi tataplah masa depan untuk menjadi yang lebih baik lagi*  
(Penulis)

*Niat, semangat, dan selalu berusaha adalah jalan untuk meraih impian dan cita-cita*  
(Penulis)

*Hidup itu perjuangan, hanya orang-orang yang mau berjuanglah yang akan mendapatkan kebahagiaan*  
(Penulis)

*Do'a adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, karena Allah adalah Maha Pendengar*  
(Penulis)

## PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :*

- 1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya*
- 2. Ayah Bundaku tercinta, Bapak Suroso dan Ibu Rustiyati,*
- 3. Adik-Adikku tersayang Aji Raspati dan Andani Maya Sari*
- 4. Yang terkasih My Boo Yudhi Ari Wibowo*
- 5. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku Mia, Iis, Novita*
- 6. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UNs*

## **ABSTRAK**

**RUSIANA IKA PUSPITASARI, E1106043, ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM (*THE RIGHT TO REMAIN SILENT*) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keberadaan jaminan asas *the right to remain silent* bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP, dan (2) untuk mengetahui arti penting asas *the right to remain silent* serta proyeksi kedepan dalam proses perkara pidana.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder, dengan cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa KUHAP secara tegas tidak mengatur asas *the right to remain silent*. Hal demikian bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 175 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Dan proyeksi sesuai hukum positif yang ada di Indonesia asas *the right to remain silent* KUHAP tidak mengakui keberadaan asas *the right to remain silent*, KUHAP hanya menyinggung masalah asas *the right to remain silent* dalam tahap pemeriksaan di persidangan, sedangkan di tahap pra sidang tidak ada pengaturannya.

Kata Kunci: eksistensi, remain silent, proyeksi

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah s.w.t dan Nabi Besar Muhammad s.a.w atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM (*THE RIGHT TO REMAIN SILENT*) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA.**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang banyak membantu dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku dosen Hukum Acara Pidana yang telah banyak membantu memberi masukan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.



7. Ayah Bundaku tercinta, Bapak Suroso dan Ibu Rustiyati yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan kalian dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
8. Adik-adikku tersayang Aji Raspati dan Andani Maya Sari yang selalu berbagi keceriaan di rumah, jangan nakal dek, tetep rajin belajar ya..Semangat!!
9. Yang terkasih *My Boo* Yudhi Ari Wibowo yang selalu menemani hari-hari penulis, memberi nasihat, kasih sayang, mengingatkan penulis supaya jaga kesehatan, jangan telat makan, yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. *I Love U Boo..*
10. Keluarga keduaku di Kratonan Mama Heni, Budhe Marni, Ayu, Nisa, Eva yang selalu mendukungku.
11. Sahabat setia ku Mia, Novita, Iis, terima kasih kalian selalu ada di kala penulis senang atau sedih, kalian mau mendengar keluh kesah penulis disaat penulis bimbang maupun menghadapi masalah. Maaf sudah banyak merepotkan kalian.
12. Teman-Teman di fakultas Hukum angkatan 2006 yang selalu berbagi keceriaan selama kuliah, Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum, terima kasih atas segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin sepenuhnya tanpa bimbingan, arahan dan petunjuk dari pihak-pihak tersebut, Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu segala bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terimakasih. Semoga amal kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan.

Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran membangun sebagai perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 11 Juli 2010

Penulis

Rusiana Ika Puspitasari

NIM. E 1106043

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Kerangka Teori .....	11
1. ....Tinja	
uan Tentang Asas Praduga Tak Bersalah .....	11
2. ....Tinja	
uan Tentang Latar Belakang Asas <i>The Right</i>	
<i>To Remain Silent</i> .....	12
3. ....Tinja	
uan Tentang Asas <i>The Right to Remain Silent</i>	
Di beberapa Negara.....	16

4. ....	Tinja
uan Tentang Hak-hak Tersangka dan Terdakwa .....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	24
 <b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Eksistensi Asas <i>The Right To Remain Silent</i> dalam	
Proses Perkara Pidana Menurut KUHP .....	26
1. ....	Asas
<i>The Right To Remain Silent</i> sebagai Pencerminan	
Asas Praduga Tak Bersalah ( <i>Presumption of Innonce</i> .....	26
2. ....	Penc
erminan Asas <i>The Right To Remain Silent</i> dalam	
KUHAP .....	28
B. ....	Proye
ksi Asas <i>The Right To Remain Silent</i> Bagi	
Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana .....	35
1. ....	Proye
ksi asas <i>The right to remain silent</i> dikaitkan	
dengan RUUKUHAP .....	35
 <b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	41
A. Simpulan .....	41
B. Saran .....	42
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43
<b>LAMPIRAN</b> .....	45

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran1 RUUKUHAP.....	45
-------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau menjatuhkan pidana.

Indonesia sebagai negara hukum harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, dan segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hukum di Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui beberapa Pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam Pasal ini terkandung Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia erat kaitannya dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Perwujudan sistem peradilan pidana yang adil dan benar juga menegakkan hukum melalui proses pengadilan pidana yang tepat, maka dengan sendirinya hak-hak asasi tersangka dan terdakwa menjadi terjamin dan terlindungi. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana khususnya bagi perlindungan hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tegaknya hukum.

Perlindungan hak asasi dan martabat seorang tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi: “Perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Penjelasan Pasal 17 KUHAP, diantaranya ditegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus mengumpulkan fakta yang benar-benar mampu mendukung kesalahan yang dilakukan tersangka melalui penyidikan (investigasi), sebelum mengeluarkan perintah penangkapan. Sehingga jelaslah bahwa penegakan hukum di Indonesia menurut KUHAP

harus berorientasi pada asas keseimbangan. Satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum dan keadilan, sedang di sisi lain aparat juga harus tetap menjunjung martabat dan hak-hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa, sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHP, memberi pedoman bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberikan oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan *the right to remain silent*.

Jika demikian yang terjadi sehingga asas tersebut memberikan potensi baik dalam hal positif maupun negatif dalam proses perkara pidana. Potensi positif dengan adanya asas *the right to remain silent* yaitu dapat melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun proses di persidangan, selain itu untuk mencegah adanya kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan. Potensi negatif asas *the right to remain silent* yaitu dapat menyulitkan penyidik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“ANALISIS TENTANG EKSISTENSI ASAS HAK UNTUK DIAM ( *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* ) BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PROYEKSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA”**.



## B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan beberapa hal yang penulis kemukakan tersebut, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan ke pembahasan, penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi asas hak untuk diam ( *the right to remain silent* ) bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah proyeksi asas hak untuk diam ( *the right to remain silent* ) bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui keberadaan jaminan asas *the right to remain silent* bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP.
  - b. Untuk mengetahui arti penting asas *the right to remain silent* dan proyeksi ke depan bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Memperluas pengetahuan dan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek, terutama di bidang hukum acara pidana berkaitan dengan

keberadaan asas *the right to remain silent* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dipergunakan oleh manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan

yang berlaku dalam pembuatan suatu karya ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986: 3).

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier .

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah keberadaan asas *the right to remain silent* bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP dan proyeksi asas *to remain silent* dalam proses perkara pidana. (Soerjono Soekanto, 2006 : 52).

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93).

Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penulisan hukum yang penulis angkat adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

### 4. Jenis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) RUUKUHAP
- 4) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif.

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 172).

## F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan tentang asas praduga tak bersalah, tinjauan tentang latar belakang asas *the right to remain silent*. Tinjauan tentang asas *the right to remain silent* di beberapa Negara, dan juga tinjauan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang eksistensi asas *the right to remain silent* dalam

KUHAP dan proyeksi ke depan sesuai RUUKUHAP bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan tentang Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system/CJS*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (sistem *adversarial*/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut. Prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau.

Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip "*due process of law*". Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari "budaya (masyarakat) Amerika", yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai saat ini.

Rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat: "*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*". Konvenan menegaskan harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang. Bahkan, tidak menegaskan juga



masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah.

Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali". Negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Proses pemeriksaan pengadilan yang "*fair and impartial*" telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi. ([http://: www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)).

## **2. Tinjauan Tentang Latar Belakang Asas *The Right To Remain Silent***

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, memberi pedoman bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberikan oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan *the right to remain silent*. Sehingga asas *the*

*the right to remain silent* merupakan pencerminan dari asas praduga tak bersalah. Dengan demikian penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang asas *the right to remain silent*.

Ada pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi "*nemo ipsum tenetur se accusare*" (tidak ada seorangpun yang terikat untuk menuduh dirinya sendiri) menjadi seruan untuk tokoh agama dan pembangkang politik yang dituntut di *Star Chamber* dan Komisi Tinggi Inggris abad ke-16. Orang-orang tersebut yang datang ke pengadilan ini dipaksa bersumpah untuk jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka tanpa mengetahui apa yang didakwakan.

Hal ini menciptakan apa yang disebut dengan istilah dakwaan kejam dimana terdakwa ini menghadapi suatu prospek sumpah palsu (yang diyakini sebagai dosa, jika mereka berbohong di bawah sumpah untuk melindungi diri mereka sendiri), hukuman yang berat karena menghina pengadilan (jika mereka menolak untuk menjawab), atau mengkhianati mereka "alami" kewajiban mempertahankan diri (jika mereka mengatakan yang sebenarnya untuk menghormati sumpah mereka).

Setelah revolusi parlemen pada akhir tahun 1600-an, menurut beberapa catatan sejarah hak untuk diam disediakan oleh hukum sebagai reaksi dari masyarakat untuk eksekusi sistem pemeriksaan tertutup oleh kerajaan di pengadilan ini. Penolakan terhadap prosedur Pengadilan *Star Chamber* dan Komisi Tinggi akhirnya mengakibatkan munculnya prinsip. Menurut ahli hukum AS dan hukum bukti ahli John Henry Wigmore, "bahwa tidak ada seorangpun yang terikat untuk memberatkan dirinya pada setiap kasus (tak peduli betapa benar dilembagakan), atau dalam setiap Pengadilan (bukan hanya dalam gerejawi atau Bintang *Chamber* pengadilan) ". Hal ini diperpanjang selama Restorasi Inggris pada tahun 1660 untuk menyertakan "saksi biasa, dan tidak hanya pada pihak-pihak yang didakwa .

Namun, hak untuk diam itu tidak selalu menjadi kenyataan praktis untuk semua terdakwa dalam pengadilan Inggris untuk beberapa periode sesudahnya. Dengan akses terbatas ke penasihat hukum (seringkali tergantung pada status sosial terdakwa), standar pergeseran bukti, dan umumnya sistem diam tidak percaya kepada terdakwa, seorang penjahat yang tetap diam dituduh sering melakukan bunuh diri kiasan atau literal. Namun demikian, itu tetap menjadi hak dasar yang tersedia bagi para terdakwa dan telah menjadi diterima dalam praktek selama beberapa abad. Di Inggris, praktek peradilan memeriksa terdakwa dalam sidang (sebagai berbeda dari pemeriksaan sidang sebelumnya), tidak benar-benar menghilang hingga memasuki abad kedelapan belas.

Pada abad ke-19, para terdakwa tidak diperbolehkan untuk memberikan bukti atas sumpah bahkan jika mereka ingin juga dikatakan sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dari *Star Chamber* dan Komisi Tinggi. Di Britania dan negara-negara Persemakmuran (dan termasuk di Irlandia, mantan anggota, dimana telah dilonggarkan sedikit), hak untuk diam tetap diabadikan di common-tradisi hukum yang diwarisi dari Inggris. Di Amerika Serikat, yang juga mewarisi tradisi hukumnya dari Inggris, itu ada sebelum Revolusi Amerika.

Hal ini dianggap sebagai salah satu pengamanan yang paling penting melindungi warga terhadap tindakan sewenang-wenang negara, dan itu diabadikan dalam Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar, bersama dengan kata-kata "proses", yang pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Edward III di tahun 1354 dan berisi kata-kata yang serupa dengan Amandemen Kelima. Berlawanan dengan pandangan kadang-kadang diungkapkan di Amerika Serikat, hak untuk diam seperti dipraktikkan di Amerika hukum tidak berasal dari sana dan tidak menyebar ke bagian lain dari

dunia, tetapi berasal dari hukum Inggris dan khususnya di negara-negara di mana telah terjadi kehadiran kolonial.

Bukti-bukti yang dapat dilihat dalam waktu dekat identik dengan sistem hukum pidana masih dalam operasi di negara-negara yang mewarisi sistem Inggris termasuk Amerika Serikat. Kedua sistem berbeda tetapi divergen di sepanjang jalan yang hak-hak ini berkembang dan berlaku di hukum Anglo-Amerika (satu melalui hak-hak yang dinyatakan dalam Konstitusi, yang lain dalam Kisah Parlemen menentukan hak atau perlindungan pada *common law*) dapat dilihat saat ini di negara-negara persemakmuran seperti Australia dan Selandia Baru, di mana polisi masih dibutuhkan pada hukum umum untuk mengeluarkan "gaya hak Miranda" (tetapi yang sama sekali tidak terkait dengan peringatan Miranda AS berlaku) dan memberitahukan orang yang ditahan bahwa mereka tidak perlu menjawab pertanyaan, tetapi yang apa pun yang mereka katakan (atau lakukan) dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti.

Mereka harus juga meminta orang yang ditangkap apakah mereka memahami hak-hak ini. Kegagalan untuk melakukannya dapat membahayakan sebuah tuntutan pidana. Meskipun sedikit berbeda dengan kata-kata yang digunakan di Amerika Serikat, tujuannya adalah identik dan berasal dari warisan tradisi hukum. Namun, di Australia, misalnya, kata-kata apapun oleh terdakwa di bawah interogasi polisi sementara dalam tahanan akan pada umumnya tidak dapat diterima sebagai bukti kecuali membenarkan, umumnya melalui rekaman *audio* atau *video*. Seperti Amerika Serikat, tersangka di negara-negara Commonwealth juga berhak untuk memiliki pengacara hadir selama interogasi.

Di Britania Raya, undang-undang yang diperkenalkan pada dekade yang lalu sementara masih mendukung praduga tak bersalah yang telah mengayunkan hak untuk diam sedikit kembali ke arah lain: tersangka diberitahu bahwa mereka memiliki hak untuk tetap diam, namun kini juga

memperingatkan bahwa apa saja yang tidak mereka ungkapkan dalam interogasi tetapi kemudian dinyatakan di pengadilan dapat membahayakan pembelaan mereka. Dengan kata lain, dalam beberapa kasus dapat ditarik kesimpulan. Hak untuk didampingi pengacara, yang juga menjadi semakin mengakar kuat di AS setelah Revolusi Amerika, terdakwa diberikan metode praktis untuk melakukan pembelaan, namun tetap dengan hak tetap diam, dan pengembangan kepolisian modern di awal tahun 1800-an membuka pertanyaan di keheningan pra-sidang untuk pertama kalinya.

Kunci kasus Amerika Serikat v. Bram membuka jalan bagi hak untuk diperluas ke pemeriksaan pra-sidang, dan praktek memberikan peringatan yang diadakan di Amerika Serikat dan di tempat lain setelah kasus Miranda v. Arizona pada tahun 1966. Meskipun awalnya asing bagi sistem peradilan inquisitorial, hak untuk diam tersebar di seluruh benua Eropa, dalam beberapa bentuk, sepanjang akhir abad ke-20, karena perkembangan dalam hukum internasional yang melihat semakin universalisasi proses perlindungan tertentu. Sebagai contoh, hak kunci diakui dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

### **3. Tinjauan Tentang Asas *The Right To Remain Silent* dan di beberapa Negara**

#### **a. Amerika Serikat**

Perlu dicatat bahwa ada konflik yang mencolok antara Miranda dan Raffel v United State yang tetap tidak terpecahkan oleh Mahkamah Agung AS. Raffel v di AS. Dalam praktek penegakan hukum, pengadilan menemukan bahwa pada saat seorang tersangka bekerja sama dan jawaban pertanyaan dan atau mengizinkan untuk mencari tersangka menyerahkan hak-hak tersebut dan harus terus kerja sama dan persetujuan melalui orang itu mungkin atau akhirnya penangkapan, pengadilan dan pembedaan. Oleh karena itu, di Amerika Serikat dengan bekerja sama

dengan polisi dengan cara apapun sebelum penangkapan, seseorang menyerah Amandemen Keempat dan Kelima hak-hak yang di bawah Raffel secara teknis tidak dapat diminta kembali, setelah penangkapan dan pemberitahuan Miranda atas hak-hak tersebut.

Dalam kenyataan ini menjadikan peringatan Miranda berlaku agak terbatas, karena polisi tidak perlu menasihati seseorang dari hak-hak nya sampai setelah ia mendakwa diri sendiri dan atau ditahan. Jika orang yang telah bekerja sama sebelum penangkapan maka tahanan telah menyerahkan sebagian besar hak-hak yang memberikan nasehat kepada polisi bahwa tahanan. Di Amerika Serikat, satu-satunya cara untuk satu untuk melindungi hak-hak seseorang sepenuhnya adalah untuk menolak menjawab pertanyaan apa pun di luar memberikan satu nama dan mengidentifikasi masalah jika diminta dan untuk menolak memberikan persetujuan terhadap apa pun (seperti pencarian) sebelum penangkapan seseorang.

Aparat penegak hukum di Amerika Serikat sangat tergantung pada intimidasi halus posisi mereka dan kekuasaan dan ketidaktahuan masyarakat untuk hak-hak mereka untuk membuat orang-orang yang memberatkan diri mereka sendiri sehingga mereka kemudian dapat melakukan penangkapan. Polisi tidak perlu memberitahu sipil kebenaran mengenai apa saja. Mereka dapat membuat janji dan klaim yang mereka sukai dalam rangka untuk mendorong seseorang untuk memberatkan dirinya sendiri atau mengizinkan polisi untuk melakukan pencarian, dan polisi tidak terikat oleh apa pun mereka berjanji untuk tersangka atau saksi (yaitu janji-janji bantuan atau perlindungan ). Amerika Serikat warga negara harus tahu hak-hak mereka untuk menghindari kehilangan mereka dengan sengaja memberikan mereka pergi

Raffel terus ditegakkan di Pengadilan AS meskipun kontradiksi dengan Miranda. *In Re Grand Jury subpoena* untuk Sebastien Boucher,

Pengadilan Distrik AS untuk Vermont memutuskan bahwa karena terdakwa telah bekerja sama sejauh yang ia miliki dan sudah berpotensi memberatkan dirinya sendiri, dengan menyatakan kepemilikan laptop-nya dan memberikan sebagian penegakan hukum dengan akses ke sana sebelum penangkapannya, bahwa ia sekarang harus menyerahkan akses lengkap untuk semua informasi pada laptop, bahkan dienkripsi dan berpotensi memberatkan diri atau informasi rahasia.

Karena terdakwa telah bekerja sama dalam bagian sudah, Mahkamah menyatakan bahwa terdakwa harus terus kerjasama dan menyediakan terdekrip dan berpotensi membahayakan informasi kepada pemerintah. Hal ini sangat penting karena sebelum putusan Mahkamah Agung AS biasanya melindungi tersangka bahkan setelah keyakinan dari persyaratan yang memberatkan diri sendiri mengungkapkan informasi seperti lokasi korban mereka tubuh dan atau properti. Seperti yang tertera di bawah ini, beberapa negara termasuk Kanada telah dengan hati-hati menghindari kontradiksi tersebut dengan jelas dapat diterima di pengadilan membuat segala informasi atau pernyataan yang diberikan oleh tersangka sebelum konsultasi hak-hak mereka untuk membungkam dan perwakilan.

#### **b. Australia**

Australia tidak memiliki perlindungan konstitusional hak untuk diam, tetapi secara luas diakui oleh Negara dan Kejahatan Federal Kisah dan Kode dan dianggap oleh pengadilan sebagai hukum umum yang penting benar. Secara umum, tersangka kriminal di Australia memiliki hak untuk menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka oleh polisi sebelum persidangan dan menolak untuk memberikan bukti di pengadilan. Sebagai aturan umum hakim tidak dapat langsung merugikan juri untuk menarik kesimpulan dari terdakwa diam (*Petty v R*)

tetapi ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini, terutama dalam kasus-kasus yang mengandalkan sepenuhnya pada bukti-bukti yang itu hanya mungkin bagi terdakwa untuk bersaksi tentang (*Weissensteiner v*). Hak ini tidak berlaku untuk perusahaan (*EPA v Caltex*).

Ada banyak *abrogations* perundang-undangan yang tepat, khususnya di bidang kebangkrutan. Ada juga *abrogations* hak Federal baru-baru ini anti-terorisme dan kejahatan terorganisir Victoria Kisah. Masing-masing menyiapkan tindakan koersif rezim pertanyaan yang beroperasi di luar proses pidana biasa. Namun, bukti kesaksian langsung yang diperoleh dari pertanyaan koersif ini tidak dapat digunakan dalam pengadilan kriminal berikutnya dari orang yang memberikan bukti.

### c. **Kanada**

Hak untuk diam adalah dilindungi di bawah bagian 7 dan Pasal 11 (c) dari Kanada Piagam Hak dan Kebebasan. Terdakwa tidak dapat dipaksa sebagai saksi terhadap dirinya sendiri dalam proses pidana, dan karena itu hanya pernyataan yang dibuat secara sukarela kepada polisi yang diterima sebagai bukti. Sebelum seorang terdakwa mendapat informasi tentang hak mereka untuk penasihat hukum, setiap pernyataan yang mereka buat polisi dianggap tanpa sadar dipaksa dan tidak dapat diterima sebagai bukti. Setelah mendapat informasi tentang hak untuk pengacara, terdakwa dapat memilih untuk secara sukarela menjawab pertanyaan dan pernyataan yang akan diterima.

Meskipun seorang terdakwa berhak untuk tetap diam dan tidak dapat dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri, di mana seorang terdakwa dengan bebas memilih untuk mengambil saksi dan bersaksi, tidak ada lagi hak untuk diam dan tidak ada batasan umum jenis pertanyaan apa yang mereka mungkin diminta untuk menjawab. Hal ini mungkin berlawanan dengan AS hak untuk menolak untuk menjawab



pertanyaan memberatkan di bawah Amandemen kelima bahkan ketika di kursi saksi. Namun bagian 13 dari Canadian Piagam Hak dan Kebebasan menjamin bahwa seorang saksi tidak memiliki bukti memberatkan yang mereka berikan sebagai kesaksian digunakan untuk melawan mereka dalam proses terpisah.

Akibatnya, seseorang dapat tidak disengaja dipaksa untuk memberikan bukti yang memberatkan diri sendiri tetapi hanya di mana bukti yang akan digunakan terhadap pihak ketiga. Dalam kebanyakan kasus, kecuali untuk pelanggaran seks tertentu atau di mana korban adalah anak-anak, pasangan tidak dapat dipaksa untuk bersaksi melawan satu sama lain. Kasus terkemuka di Kanada untuk keheningan adalah *R. v. Hebert*, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bisa tertipu untuk memberitahukan informasi apapun sampai mereka berkonsultasi dengan seorang pengacara.

#### **d. Perancis**

Di Perancis, Hukum Acara Pidana ( Pasal L116 ) mewajibkan bahwa ketika seorang hakim menyelidiki tersangka, ia harus memperingatkan dia bahwa ia memiliki hak untuk tetap diam, untuk membuat pernyataan, atau menjawab pertanyaan. Seseorang kecurigaan terhadap yang terletak tidak dapat secara legal dapat diinterogasi oleh keadilan sebagai saksi biasa. Pada sidang yang sebenarnya, seorang terdakwa dapat dipaksa untuk membuat pernyataan. Namun, kode ini juga melarang mendengar seorang tersangka di bawah sumpah; demikian, seorang tersangka dapat mengatakan apa saja yang dia merasa cocok untuk pertahanan, tanpa takut sanksi bagi sumpah palsu. Larangan ini diperluas untuk tersangka pasangan dan anggota keluarga dekat (ini perpanjangan larangan mungkin akan dibebaskan jika kedua pihak penuntut dan pembela setuju dengan pembatalan).

**e. Jerman**

Menurut § 136 Strafprozessordnung (StPO, yaitu Hukum Acara Pidana) seorang tersangka, ditahan atau tidak, harus diinformasikan sebelum interogasi tentang haknya untuk tetap diam. Hal ini tidak diperbolehkan untuk menarik semua gangguan dari keheningan lengkap terdakwa dalam setiap tahap proses pidana. Namun, diperbolehkan untuk menarik kesimpulan jika terdakwa tetap diam hanya untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu mengenai kejahatan yang sama. Tersangka tidak dapat didengar di bawah sumpah.

Seseorang yang masuk akal terhadap yang ada menyebabkan kecurigaan dapat diperiksa sebagai saksi biasa dalam pidana terhadap orang lain. Namun, dalam kasus ini menurut § 55 StPO, saksi dapat menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (atau salah satu kerabat). Saksi yang mencurigakan juga harus memperingatkan tentang haknya untuk tetap diam. Mencurigakan saksi tidak dapat didengar di bawah sumpah.

**4. Tinjauan Tentang Hak-hak Tersangka dan Terdakwa.**

**a. Pengertian tentang Tersangka dan terdakwa.**

Tersangka atau terdakwa adalah orang-orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal ini dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 dan butir 15, dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dijelaskan: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Sementara Pasal 1 butir 15 KUHAP, menjelaskan:

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa seorang tersangka atau terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak

pidana sesuai dengan bukti permulaan yang cukup sehingga orang tersebut harus dilidik, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian harus dilakukan tindakan penuntutan dimuka sidang oleh penuntut umum dan hakim dan jika perlu dapat dilakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sesuai cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pada saat ini tersangka atau terdakwa tidak lebih dari objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi, harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa tidak pernah dihargai.

**b. Hak- hak tersangka dan terdakwa.**

Pada hakekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam hal ini ada dua kerangka penting yang harus di perhatikan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Kedua kepentingan tersebut mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana.

Hukum acara merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Kepastian hukum tersangka atau terdakwa berarti setiap tersangka atau terdakwa harus diproses melalui hukum dengan standar yang sama atas semua kasus yang sama dan terhadap orang yang sama. Pasti berarti juga terukur, jelas dan transparan, agar terlaksana dengan seimbang hak- hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak- hak tersebut antara lain:

**1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.**

Seorang terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan baik dalam penyidikan atau dalam persidangan. Seperti disebutkan dalam Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa seorang tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan

oleh penyidik dan selanjutnya dihadapkan pada penuntut umum. Kemudian hak tersangka untuk perkaranya segera diajukan ke Pengadilan dan berhak segera diadili oleh Pengadilan.

2) Hak untuk melakukan pembelaan.

Seorang tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk membela diri baik dengan penasehat hukum atau tidak. Berbagai pembelaan yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 51-57 KUHAP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b) Berhak memberikan keterangan secara bebas dalam berbagai tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan.
- c) Berhak untuk mendapatkan juru bahasa dalam semua tingkat pemeriksaan baik dari penyidikan sampai proses pengadilan.
- d) Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

3) Hak untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan pada Undang-Undang seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman dapat menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan. Ketidak puasan atas putusan pengadilan bisa dimanfaatkan untuk melakukan upaya hukum yang di bagi menjadi dua, yaitu:

a) Upaya hukum biasa.

Upaya hukum biasa dapat berupa permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi dan upaya permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

b) Upaya hukum luar biasa.

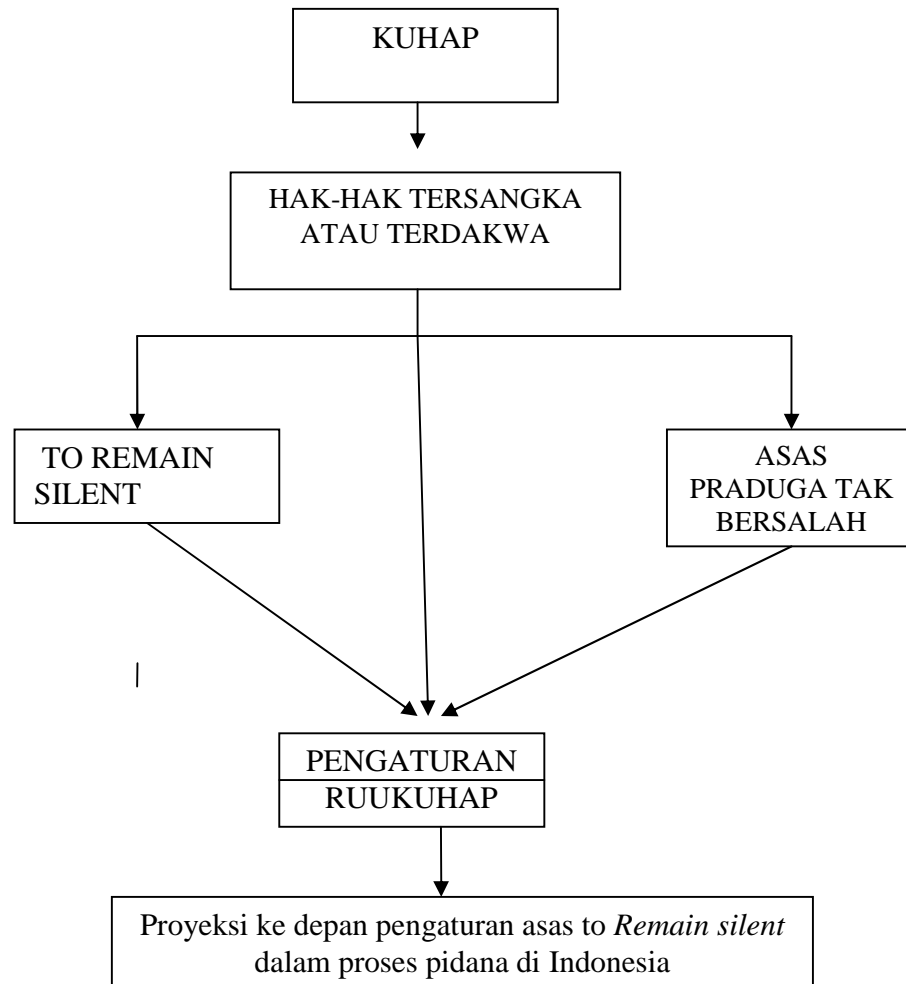
Upaya hukum luar biasa dapat berupa permintaan pemeriksaan Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Hak untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi atau rehabilitasi dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa apabila:

- a) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.
- b) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

**A. Kerangka Pemikiran**



### **Keterangan**

Dengan berlakunya KUHAP akan membawa perubahan besar bagi kualitas penegakan hukum di Indonesia karena KUHAP lebih menekankan pada terjaminnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan implementasi dari asas praduga tak bersalah yang merupakan nilai universal dalam sistem hukum acara pidana di seluruh dunia. Asas *the right to remain silent* merupakan pencerminan dari

asas praduga tak bersalah. Asas tersebut di berbagai negara telah diatur secara tegas, akan tetapi di Indonesia khususnya di dalam KUHAP secara lengkap belum ada pengaturannya. Proyeksi asas *the right to remain silent* didalam RUUKUHAP diatur secara tegas sehingga dalam proses perkara pidana terutama didalam perlindungan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Asas *the right to remain silent* dapat membawa potensi positif maupun negatif dalam proses perkara pidana. Potensi positif asas tersebut yaitu sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan hak-hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan perkara pidana, sedangkan potensi negatifnya yaitu mempersulit dalam proses penyidikan suatu perkara pidana.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi Asas *The Right To Remain Silent* dalam Proses Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Keberadaan asas *The Right To Remain Silent* merupakan pencerminan dari adanya asas praduga tak bersalah karena dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah, hak-hak seorang tersangka atau terdakwa akan terjamin. Untuk itu penulis akan menguraikan, yaitu:

##### **1. Asas *The Right To Remain Silent* sebagai Pencerminan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innonce*)**

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut dicantumkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka sudah sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam Hukum Acara Pidana, karena ketentuan asas praduga tak bersalah sangat tampak eksistensinya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lilik Mulyadi, 2007 : 13).



Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Asas praduga tak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga tak bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tak bersalah bersifat legal normatif dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual artinya berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaan hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian.

Penuntut Umum adalah pihak yang mengajukan dakwaan kepada terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang. Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat diartikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terdakwa belum dapat dikategorisasikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah mendapatkan haknya sebagaimana diatur Undang-Undang, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya. (Lilik Mulyadi, 2007: 13).

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

## **2. Pencerminan Asas *The Right To Remain Silent* dalam KUHAP**

Pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur tentang “*the right to remain silent*”. KUHAP tidak menganut asas *the right to remain silent*. (M.Yahya Harahap, 1988: 725).

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perumusan ketentuan dalam Pasal 175 KUHAP. Perumusan Pasal 175 menyatakan bahwa “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan kepentingan serta perlindungan kepentingan hukum para hakim dan terdakwa

serta penasehat hukum. Maka masing-masing pihak harus menyadari bahwa pelaksanaan asas *the right to remain silent* harus dilaksanakan dengan asas keseimbangan.

Asas keseimbangan dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegak hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sebelum KUHAP berlaku, dipengaruhi oleh alam pikiran bahwa aparat penegak hukum adalah tergolong kelompok “alat kekuasaan” atau *instrument of power* yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Aparat penegak hukum pada setiap saat harus sadar dan mampu bertugas, dan berkewajiban untuk mempertahankan *social interest* (kepentingan masyarakat) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi *human dignity* dan *individual protection*, yakni menjunjung tinggi martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.

Dengan demikian, aparat penegak hukum mesti mengubah sikap mental dan pandangan kearah cakrawala penegakan hukum yang menempatkan kedudukan bukan lagi semata-mata sebagai *instrument of power* (alat kekuasaan), tetapi harus mampu memahami dan melihat sebagai

*agency of service*. Sudah saatnya aparat penegak hukum, mampu “menjadi budak atau pelayan hamba-hamba mereka”, atau *a master is a slava of his slaves*. (M. Yahya Harahap, 2002: 38).

Itu sebabnya dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, KUHAP telah menonjolkan tema *human dignity* (martabat kemanusiaan), dalam pelaksanaan tindakan penegasan hukum di Indonesia.

Asas keseimbangan di dalam KUHAP yang sesuai dengan Pasal 175 KUHAP memberikan pengertian bahwa pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan harus melindungi kepentingan terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi dan kepentingan ketertiban masyarakat pada sisi lain tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia demi mengejar kepentingan umum.

Penerapan Pasal 175 KUHAP sebagai suatu keseimbangan, terdakwa seharusnya menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah anggota masyarakat ikut bertanggung jawab tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat (M.Yahya Harahap, 1988: 726).

Hal ini dimaksudkan agar seorang yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sebaliknya, juga menghendaki seorang yang tidak bersalah, tidak mendapat hukuman yang tidak sepatasnya diberikan kepadanya.

Hakim juga tidak boleh memaksa terdakwa untuk menjawab kalau terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang boleh dilakukannya hanya “menganjurkan” terdakwa untuk menjawab. Selain itu, hakim ataupun penuntut umum tidak boleh mengartikan diamnya terdakwa sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban sidang. Apalagi sampai mempertimbangkan dan menarik

kesimpulan bahwa keengganan menjawab sebagai keadaan yang memberatkan kesalahan dan hukuman terdakwa.

Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, dengan argumentasi yang matang dan cukup pertimbangannya sehingga pemeriksaan terdakwa dititiksentralkan pada asas keseimbangan antara kepentingan terdakwa pada satu pihak dan kepentingan umum di pihak lain, untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Keberadaan Pasal 175 KUHAP untuk melegalkan terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan ketika pemeriksaan, tidak semata-mata digunakan begitu saja karena terdakwa bisa dengan mudah lepas dari tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan.

Meskipun KUHAP tidak mengatur tentang asas *the right to remain silent*, akan tetapi di dalam KUHAP tersirat beberapa Pasal yang mencerminkan tentang asas *the right to remain silent* tersebut. Adapun beberapa ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHAP yang mensiratkan asas *the right to remain silent* antara lain adalah:

a. Pasal 52 KUHAP

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Menurut penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut di atas tujuan dirumuskannya ketentuan Pasal 52 KUHAP adalah supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

b. Pasal 117 KUHAP

Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun”.

Oleh karena itu, Pasal 52 KUHAP maupun Pasal 117 KUHAP itu sebenarnya berkaitan erat dengan asas-asas pemeriksaan keterangan terdakwa atau tersangka. Namun demikian sayangnya kedua Pasal ini tidak menyebutkan sama sekali tentang masalah keabsahan hasil penyidikan yang diperoleh dengan cara penyiksaan itu.

c. Pasal 189 ayat (3) KUHAP

Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Asas *the right to remain silent* yaitu, suatu hak tersangka untuk tidak menjawab artinya keterangan tersangka atau terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, karena di dalam perundang-undangan hukum acara pidana adanya suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti lagi, bahkan hanya menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan penyebutan “keterangan terdakwa”, bukan suatu “pengakuan terdakwa”.

d. Pasal 166 KUHAP

Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”. Sesuai penegasan Pasal 153 ayat (2) huruf b, pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi “dilakukan dengan bebas”. Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, tidak boleh dilakukan “penekanan” atau “ancaman” yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Bahkan pertanyaan yang “bersifat menjerat” tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP.

Praktek pemeriksaan persidangan jarang terjadi tindakan ancaman atau penekanan yang dilakukan oleh hakim atau penuntut umum. Dalam pemeriksaan sidang yang terbuka untuk umum, agak sulit bagi hakim atau jaksa mengancam dan menekan terdakwa atau saksi, tetapi keterangan itu diberikan berdasar pancingan yang berbentuk jebakan dari si penanya. Yang dimaksud dengan pertanyaan yang menjerat dalam penjelasan Pasal 166 KUHAP, antara lain:

- 1) Pada alinea ketiga dijelaskan, KUHAP mengandung prinsip bahwa keterangan terdakwa dan saksi dalam semua tingkat pemeriksaan harus dilakukan dengan bebas. Hal-hal yang dapat melumpuhkan kebebasan terdakwa atau saksi dalam memberikan keterangan, pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:
  - a) Sebagai akibat dari pertanyaan yang menjerat
  - b) Disebabkan adanya tekanan dan ancaman yang membuat terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan dari apa yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikiran yang bebas.
- 2) Pada alinea pertama penjelasan tersebut menegaskan apa yang dimaksud dengan pertanyaan menjerat, yaitu :
  - a) Suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi dengan suatu pertanyaan yang sedemikian rupa licik dan agresifnya, telah mengakibatkan terdakwa tanpa sadar kehilangan keseimbangan untuk memahami dengan penuh pengertian pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan kepadanya, sehingga menyebabkan terdakwa seolah-olah telah memberi persetujuan atau pengakuan bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.
  - b) Atau sesuatu yang tidak dinyatakan oleh saksi, akan tetapi dianggap seolah-olah dinyatakannya sebagai akibat dari kelicikan dan keagresifan pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada saksi, yang mengakibatkan saksi kehilangan kesadaran dan keseimbangan berpikir.

Dari penjelasan Pasal 166 di atas, dilarang mengajukan pertanyaan menjerat baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Hakim harus menegakkan prinsip pemeriksaan persidangan “secara bebas”. Pasal 166 KUHAP tidak menyebut sanksinya bagi pihak-pihak yang melanggar.

Jika ternyata benar terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 166 KUHAP, cukup alasan menerima kasasi atas dasar *judex factie* telah melanggar ketentuan Undang-Undang, Karena telah melakukan cara mengadili tidak sebagaimana ditentukan Pasal 166 KUHAP. Pelanggaran atas Pasal 166 dapat mengakibatkan, yaitu :

- 1) Tingkat kasasi dapat menyatakan pemeriksaan “tidak sah” yang berakibat pemeriksaan dan putusan “batal”
- 2) Berbarengan dengan itu memerintahkan ulang pemeriksaan

Pada prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini menegaskan, agar terdakwa dihadapkan ke terdakwa berada dalam keadaan bebas, tidak boleh diperiksa dalam keadaan terbelenggu, tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan, dengan jalan melakukan pengawalan yang sewajarnya dan memadai.

Jadi secara tegas KUHAP tidak mengenal asas yang memberi hak kepada terdakwa untuk menolak menjawab pertanyaan, karena ketika seseorang menjadi terperiksa atau terdakwa, akan menjadi sesuatu hal yang wajar dan diperkenankan untuk berbohong sesuai dengan asas *the right to remain silent* dan hak ingkar.



## **B. Proyeksi Asas *The Right to Remain Silent* bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana**

Berdasarkan eksistensi asas *the right to remain silent* menurut KUHAP yang telah penulis uraikan di atas, asas *the right to remain silent* secara tegas tidak berlaku dalam hukum positif yang ada di Indonesia, Proyeksi dari asas *the right to remain silent* dalam RUUKUHAP diakui keberadaannya sehingga diterapkan dalam proses perkara pidana terutama dalam perlindungan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa.

### **1. Proyeksi asas *The right to remain silent* dikaitkan dengan RUUKUHAP**

Asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitur" atau "*inquisitorial system*" yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, yang sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya sebab, sejak semula aparat penegak hukum mempunyai anggapan, yaitu:

- a. sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik.
- b. tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang

dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. (M. Yahya Harahap, 2002: 41).

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka atau terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan oleh KUHAP.

Namun, dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi pengaturan mengenai pemberlakuannya asas *The right to remain silent* dalam pengaturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam Pasal 167 RUUKUHAP yang menyatakan bahwa “Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan” sehingga terdakwa tidak diberi kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan namun hakim hanya menganjurkan saja.

Pada dasarnya jika diberlakukannya RUUKUHAP menjadi hukum positif di Indonesia asas *The right to remain silent* diakui keberadaanya karena diatur dalam hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam RUUKUHAP hak-hak tersangka dan terdakwa yang mengakui keberadaan asas hak untuk diam *the right to remain silent* yaitu pada Pasal 90 RUUKUHAP yang menyatakan

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan

atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa.

(3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.

Jadi sesuai ketentuan Pasal 90 RUUKUHAP dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa mengatur tentang adanya asas *The right to remain silent*. Dan, keterangan tersangka maupun terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RUUKUHAP) dalam Pasal 176 “Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari penjelasan bunyi pasal tersebut sehingga jelas dalam menjatuhkan putusan hakim memerlukan minimal adanya dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dalam RUUKUHAP dikenal tujuh jenis alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 177 RUUKUHAP yaitu:

- a. barang bukti
- b. surat-surat
- c. bukti elektronik
- d. keterangan seorang ahli
- e. keterangan seorang saksi

- f. keterangan terdakwa
- g. pengamatan hakim

Demikian juga untuk menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan atas alat-alat bukti setidaknya dua alat bukti sah sehingga ia mendapat keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa serta dia bersalah melakukannya (Pasal 176 RUUKUHAP).

Keterangan terdakwa hanya salah satu dari lima jenis alat bukti dan tidak harus selalu ada atau diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam praktik, penyidikan suatu perkara pidana maupun proses persidangan di pengadilan, pengakuan terdakwa tidak dijadikan alat bukti penting karena setiap saat dapat berubah di persidangan sesuai kemauan terdakwa. Bahkan, seandainya terdakwa bersikap diam sejak penyidikan sampai ke persidangan di pengadilan, tidak akan dapat memengaruhi hakim guna menghukum terdakwa jika alat-alat bukti lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pada Pasal 181 ayat (3) RUUKUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri” dan dalam Pasal 181 ayat (4) bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah”.

Sikap diam tersangka dalam penyidikan atau di pengadilan akan dapat membawa potensi baik hal yang positif maupun potensi yang negatif, boleh jadi akan merugikan tersangka atau terdakwa karena tidak dapat mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan atau menjelaskan alasan yang dapat dimaklumi mengapa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sikap diam tersangka atau terdakwa

mungkin dapat menguntungkan jika penyidik tidak mampu mencari atau menemukan alat-alat bukti lain dalam kasus pidana itu.

Asas *the right to remain silent* terjadi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya saja kasus pembunuhan, dengan sikap diam tersangka atau terdakwa tersebut sementara penyidik melakukan pemaksaan dengan berbagai cara agar mendapat pengakuan tersangka dan sampai terjadi pemaksaan demikian, hal itu tidak akan ada artinya jika di pengadilan terdakwa memungkiri dengan alasan terpaksa mengaku karena disiksa.

Namun, dapat terjadi sebaliknya jika tersangka atau terdakwa terpaksa tetap mengakui perbuatannya sampai putusan pengadilan padahal sebenarnya tidak melakukan perbuatan itu. Maka, akan terjadi peradilan sesat yang menghukum orang-orang yang tidak bersalah, Namun hingga kini masih belum ada aturan hukum yang tegas melarang berbagai bentuk pemaksaan untuk mendapat pengakuan dari tersangka meski dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Apabila masih juga terjadi penghukuman terdakwa yang terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan, akan dapat terus terjadi peradilan sesat yang menzalimi seseorang yang tidak bersalah di negeri ini.

Jadi dengan adanya asas *the right to remain silent* dapat memberikan potensi bagi tersangka atau terdakwa baik hal positif maupun negatif. Potensi positif yaitu dapat melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari penyiksaan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan dalam proses perkara pidana. Namun, disisi lain juga memberikan potensi yang negatif yaitu dapat mempersulit penyidik dalam mengungkapkan suatu perkara pidana serta dapat merugikan tersangka atau terdakwa

karena dengan sikap diam tersebut tersangka atau terdakwa tidak dapat mengemukakan hal-hal yang meringankan ataupun menjelaskan sebab terjadinya tindak pidana.

Seperti yang disinggung di atas, teoritis pemberian hak ini telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama derajatnya dengan pejabat aparat penegak hukum. Namun dalam praktek, hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertarungan untuk dapat diwujudkan secara nyata. Sebab kalau hal-hal tadi dilanggar dapat mengajukan sah tidaknya pelanggaran itu kepada pra peradilan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. (M Yahya Harahap, 2002: 42).

Dengan pengembangan asas *the right to remain silent* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan. (M. Yahya Harahap, 2002: 96).

Adanya asas *the right to remain silent* semata-mata adalah usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan. Hal ini sebenarnya telah ditoleransi dan menjadi perhatian penyusun Undang-Undang sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa dalam RUUKUHAP.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. SIMPULAN**

Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis yaitu: (1) tentang eksistensi asas hak untuk diam ( *The right to remain silent* ) bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP, dan (2) tentang proyeksi asas hak untuk diam ( *The right to remain silent* ) bagi tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan eksistensi asas *the right to remain silent*, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP secara tegas tidak mengatur asas tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 175 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya , Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Dengan demikian KUHAP tidak mengakui keberadaan asas *to remain silent*. KUHAP hanya menyinggung masalah asas *to remain silent* dalam tahap pemeriksaan di persidangan, sedangkan di tahap pra sidang tidak ada pengaturannya.
2. Proyeksi asas *the right to remain silent* dikaitkan dengan adanya RUUKUHAP bahwa asas *the right to remain silent* diakui keberadaanya yaitu pada Pasal 90 RUUKUHAP yang mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Dengan adanya asas *the right to remain silent* diusahakan dapat mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan.

## B. SARAN

1. Asas *the right to remain silent* merupakan perwujudan dari asas praduga tidak bersalah yang bersifat universal. Untuk itu perlu ada pengaturan secara tegas dan terperinci di dalam rancangan KUHAP. Dengan pengaturan yang tegas diharapkan tidak ada keraguan dari para aparat penegak hukum untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Penggunaan asas *the right to remain silent* harus dilakukan secara bijaksana dan hati-hati agar tidak menjadi bumerang dalam penegakan hukum. Harus selalu diingat bahwa penegakan hukum selain harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, juga harus memperhatikan kepentingan pihak korban atau masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku kejahatan tersebut.
3. Sehubungan dengan semakin gencarnya tuntutan peningkatan hak asasi manusia dalam penegakan hukum, dan salah satu diantara tuntutan itu berkenaan dengan kualitas penegakan asas *the right to remain silent*, sudah selayaknya kepolisian menyiapkan sumber daya manusia yang memahami dengan baik pengertian dan penerapan asas *the right to remain silent*, secara komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi*. Jogjakarta: Amarta Buku.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif ( Dasar-dasar Teoritis dan Praktis )*. Surakarta: UNS Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif ( Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian )*. Surakarta: UNS Press..
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Ruang Lingkup Pemeriksaan Terdakwa)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ( Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali )*. Surakarta: UNS Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Vide Indriyanto Seno Adji. 1988. *Penyiksaan dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Sinar Harapan.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet**

Anggara. *Bantuan Hukum dan Pembaharuan KUHAP*.  
<http://anggara.org/opinihukum> [10 Desember 2009 pukul 10.00]

Detik.com. <http://peringatan-miranda-dan-rekayasa-penangkapan-pemulung-chairul-saleh-.htm> [2 Mei 2010 pukul 08.00]

Romli Atmasasmita. <http://www.legalitas.org> . [10 Desember 2009 pukul 10.00]

